

# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

Nurharibnu Wibisono<sup>1</sup>, Fatchur Rochman<sup>2</sup>, Esa Nurwanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>)Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No 79, Madiun, 63133

E-mail: [nurharibnu@unmer-madiun.ac.id](mailto:nurharibnu@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup>)Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No 79, Madiun, 63133

E-mail: [fatchur@unmer-madiun.ac.id](mailto:fatchur@unmer-madiun.ac.id)

<sup>3</sup>)Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No 79, Madiun, 63133

E-mail: [esayohan.gushon@gmail.com](mailto:esayohan.gushon@gmail.com)

## Abstract

*It research aims to examine the influence of community participation, transparency & accountability in the supervision of dorp funds in Kare Village, Kare District, Madiun Regency. The sample in it research were village officials and RTs. Searching for main data through spread out questionnaires to the study sample. The data obtained were tested with regression of multiple linear studies. Study results show the variable of social participation has no effect on the supervision of village funds, the variable of transparency has an influence on the management of dorp funds, the variable of accountability has an effect on the management of dorp funds and the variables of community participation, transparency and accountability have an influence on the supervision of dorp funds. Adjsted R<sup>2</sup> has a mark of 55.1%, which means that the variable of village fund supervision is affected by community participation, transparency and accountability while the rest 44.9% is the influence of other reasons not included in this research.*

**Keywords:** Public Participation, Transparency, Accountability, Management Of Village Funds

## I. PENDAHULUAN

Desa adalah suatu pemerintahan yang berada pada sebuah desa di wilayah kecamatan. Desa memiliki fungsi strategis untuk menjalankan proses pembangunan yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Desa atau desa adat atau sebutan lain, berikutnya dinamai Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ruang daerah yang berhak mengelola dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, keperluan warga lokal bersumber inisiatif warga, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihargai oleh sistem pemerintahan NKRI (UU 6/2014). Pengelolaan Dana Desa berhubungan dengan masyarakat desa yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat desa, pemerataan kue pembangunan, peningkatan *public service*, kemajuan ekonomi desa, pengurangan kepadatan pembangunan antardesa, serta penguatan warga desa selaku subjek pembangunan.

Menurut Permendagri 113/2014, Dana Desa ialah “sumber dana dari APBN bagi Desa yang dikirim lewat bank diteruskan ke APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pendanaan implementasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan sosial”. Siklus penyelenggaraan Dana Desa ialah *planning*, penganggaran, implementasi, penatausahaan, *reporting*, dan *accountability*.

*The result of research that strengthening budget oversight by local legislatur must begin from planning, budgeting process to the public services supervision. So that budget supervision to be more under control and planned, the local legislatur must execute a few steps including decide targets and standards, metering factual performance, proportion outcomes with predetermined goal and standards, taking important corrective doings. (Mintarti dkk, 2019).* Perencanaan dan penganggaran memegang peranan penting suksesnya pengelolaan Dana Desa karena APBDesa melewati mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Menurut Permendagri 45/2017, “partisipasi masyarakat adalah ikut serta masyarakat dalam menyampaikan keinginan, pemikiran, serta keperluannya pada pelaksanaan pemerintahan daerah”. Transparansi menjamin hak semua kalangan untuk memahami seluruh tahapan dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan keterangan masalah penyelenggaraan dana desa. Dengan transparansi, maksudnya pemerintah desa memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penanganan dana desa. Menurut Permendagri Nomor 113/2014, “transparansi ialah ketentuan keterbukaan di mana masyarakat dapat mengetahui serta memperoleh sumber informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah”.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada warga desa berdasarkan ketentuan atas segala kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan desa. Pada tahun 2012 terdapat kasus yang berada di Kecamatan Kare tepatnya di Desa Morang yaitu tentang kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan terpidana Kepala Desa Sukamto. Menurut Perpres RI Nomor 29/2014, “Akuntabilitas kinerja ialah pengejawantahan kewajiban sebuah institusi pemerintah guna pertanggungjawaban amanah atas kesuksesan atau kegagalan penyelenggaraan program serta aktifitas amanah dari *stakeholders* untuk meraih misi lembaga dengan sasaran/target terukur. Kinerja berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah disusun berkala”.

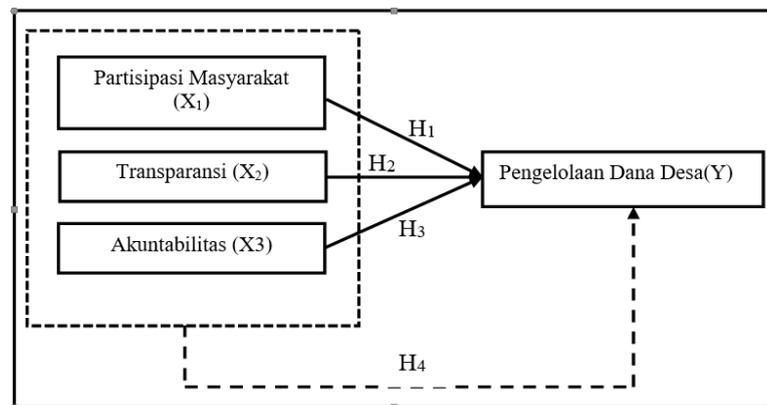
Kelemahan pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi pendamping desa, kurangnya pembinaan serta

supervisi oleh Camat, lemahnya pembinaan serta supervisi dari Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan serta Pembangunan (TP4), kurangnya supervisi dari BPD, kurangnya peran serta pengawasan Dana Desa oleh masyarakat, banyaknya beban non anggaran, dan lemahnya SDM pengelola Dana Desa serta Kedes. (Wibisono dan Purnomo, 2017). SDM sebagai pengelola kegiatan Dana desa memegang peranan penting kesuksesan pengelolaan Dana Desa. SDM berpengaruh positif pada kinerja Pemdes serta faktor pengelolaan keuangan desa berdampak positif pada kinerja Pemdes. (Fitria dan Wibisono, 2019)

Premananda dan Latrini (2017) menyatakan, peran serta anggaran berimplikasi positif terhadap kinerja bujet. Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan peran serta masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sugista (2017) menyimpulkan, peran serta masyarakat berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Nurhasanah (2019) menyimpulkan peran serta masyarakat berpengaruh negatif pada pelaksanaan dana desa.

Premananda dan Latrini (2017) menunjukkan, transparansi berdampak positif pada kinerja bujet. Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa menyatakan, transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian dana desa di Kec Abiansemal Kab Badung.

Premananda dan Latrini (2017) menunjukkan, akuntabilitas berdampak positif pada kinerja bujet. Putra dan Rasmini (2019) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban berdampak positif pada efektivitas pengendalian dana desa di Kec Abiansemal Kab Badung. Penelitian Saeful Fahri (2019) yang menunjukkan hasil akuntabilitas tidak berdampak kepada pengelolaan dana desa. Rumusan masalah studi ini ialah bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tujuan riset guna mengetahui pengaruh peran serta masyarakat, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Faedah hasil riset adalah memberi dukungan kepada masyarakat dan aparat desa agar meningkatkan pembangunan dan kreatifitas pembangunan desa secara partisipasi dan swadaya.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

- H1: Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.
- H2: Transparansi berpengaruh positif pada Pengelolaan Dana Desa.
- H3: Akuntabilitas berpengaruh positif pada Pengelolaan Dana Desa.
- H4: Variabel partisipasi masyarakat, transparansi serta akuntabilitas secara bersamaan berpengaruh positif dalam pengelolaan Dana Desa.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini berjenis *quantitative research*. Lokasi riset berada di desa Kare, kec Kare, kab Madiun. Jumlah penduduk desa Kare kurang lebih 6.468 jiwa yang terdiri dari 36 RT mencakup 4 Dusun. Populasi riset ialah semua perangkat desa Kare sebanyak 12 jiwa dan Ketua RT sebanyak 20 orang. Total sampel sebanyak 32 orang.

Partisipasi Masyarakat (X1) ialah peran serta masyarakat untuk menyalurkan kehendak, pemikiran serta kepentingan untuk penyelenggaraan Pemda (Permendagri Nomor 45 tahun 2017). Transparansi (X2) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan rakyat guna mengetahui serta memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya terhadap keuangan daerah (Permendagri 113/2014).

Akuntabilitas Kinerja ialah pengejawantahan kewajiban institusi pemerintah guna mempertanggungjawabkan kesuksesan/kegagalan pelaksanaan program serta kegiatan yang sudah diberikan oleh *stakeholders* guna meraih misi lembaga dengan terukur melalui target/sasaran kinerja yang sudah diputuskan lewat pelaporan kinerja instansi pemerintah yang dibuat berkala (Perpres RI 29/2014). Pengelolaan Dana Desa (Y) ialah pengelolaan Dana Desa yang berasal dari APBN diteruskan ke APBD diperlukan untuk kepentingan Desa (Permendagri No. 113/2014).

Alat bantu olah statistik menggunakan program SPSS 25. Kuesioner menggunakan skala likert 1-5 digunakan sebagai instrumen riset. Pengujian kuisisioner melalui uji validitas serta reliabilitas. Analisis data menggunakan *multiple regression*.

### III. HASIL SERTA PEMBAHASAN

#### A. Hasil Uji Kuisioner

Berdasarkan hasil pada tabel 1, partisipasi masyarakat (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas (X3) serta Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai hasil diatas angka r-tabel yaitu 0,344. Jadi, semua unsur pertanyaan yang diajukan ialah valid dan bisa digunakan.

**Tabel 1: Uji Validitas**

Item	Correlation	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,745	0,344	Valid
X1.2	0,802	0,344	Valid
X1.3	0,460	0,344	Valid
X1.4	0,873	0,344	Valid
X1.5	0,849	0,344	Valid
X2.1	0,833	0,344	Valid
X2.2	0,807	0,344	Valid
X2.3	0,476	0,344	Valid
X2.4	0,886	0,344	Valid
X3.1	0,834	0,344	Valid
X3.2	0,869	0,344	Valid
X3.3	0,848	0,344	Valid
X3.4	0,577	0,344	Valid
Y <sub>1</sub>	0,793	0,344	Valid
Y <sub>2</sub>	0,761	0,344	Valid
Y <sub>3</sub>	0,879	0,344	Valid
Y <sub>4</sub>	0,598	0,344	Valid
Y <sub>5</sub>	0,637	0,344	Valid

Sumber: Data output SPSS 25

**Tabel 2: Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbachs's Alpha	N of Item	Ket
Partisipasi Masyarakat (X <sub>1</sub> )	0.808	5	Reliabilitas
Transparansi (X <sub>2</sub> )	0,757	4	Reliabilitas
Akuntabilitas (X <sub>3</sub> )	0,797	4	Reliabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,794	5	Reliabilitas

Sumber: Data output SPSS.25

Pada tabel 2 terlihat variabel partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa menunjukkan angka *cronbachs' alpha* di atas 0,60. Artinya, semua unsur pertanyaan riset adalah reliabel, sehingga bisa digunakan pada riset ini.

**B. Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

**Tabel 3: Uji KS**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,55993442
Most Extreme Differences	Absolute	,125
	Positive	,113
	Negative	-,125
Test Statistic		,125
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil SPSS.25

Uji KS pada tabel 3 menghasilkan partisipasi masyarakat, transparansi serta akuntabilitas menunjukkan VIF di bawah 10 serta tolerance di atas 0,10. Artinya, variabel bebas bisa digunakan dalam riset.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 4 menunjukkan nilai uji autokorelasi  $0,758 > 0,05$  yaitu sebaran data diperoleh random.

**Tabel 4: Uji Runs Test**  
Runs Test

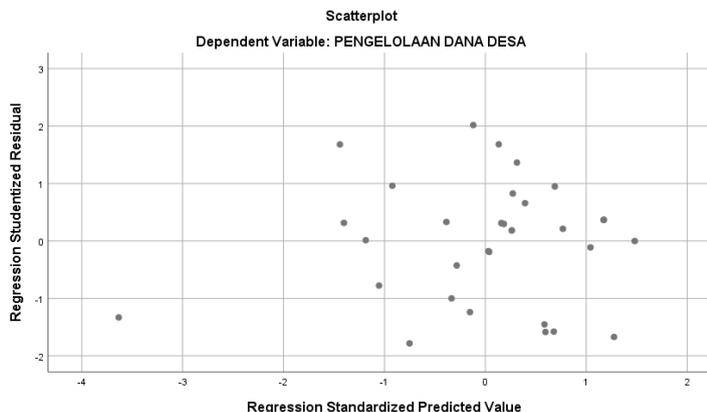
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,29431
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	18
Total Cases	33
Number of Runs	16
Z	-,308
Asymp. Sig. (2-tailed)	,758

a. Median

Sumber: Data output SPSS.25

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa sebaran data tidak menunjukkan kesamaan antar satu sama lain. Artinya, riset bebas dari heteroskedastisitas.



Sumber: Data output SPSS.25

Gambar 2: Hasil Scatterplot

4. Uji Multikolinieritas

Tabel 5: Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF		Tolerance		Keterangan
Partisipasi Masyarakat	1,885	<10	0,531	>0,10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Transparansi	2,418	<10	0,414	>0,10	Tidak terjadi Multikolinieritas
Akuntabilitas	1,758	<10	0,569	>0,10	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data output SPSS.25

Tabel 5 memperlihatkan partisipasi masyarakat, transparansi serta akuntabilitas menunjukkan hasil VIF<10 serta toleransi >0,10. Maksudnya, data tanpa ada multikolinieritas pada riset.

C. Analisis Multiple Regression

Tabel 6: Uji Analisis Multiple Regression

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Koefisien		Standardized Koefisien		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Konstanta)	7,735	2,467		3,135	,004
	Partisipasi masyarakat	-,097	,134	-,117	-,721	,477
	Tranparansi	,611	,197	,570	3,098	,004
	Akuntabilitas	,344	,153	,354	2,253	,032

a. Dependen Variabel: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai persamaan *multiple regression* :  
 $Y = 7,735 - 0,097X_1 + 0,611X_2 + 0,344X_3$

Penafsirannya ialah:

- $\alpha$  Konstanta sebesar 7,735. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pengelolaan dana desa bernilai sebesar 7,735 dengan asumsi bahwa masing-masing variabel partisipasi, transparansi dan akuntabilitas bernilai 0.
- $\beta_1$  Variabel partisipasi masyarakat mempunyai koefisien regresi sebanyak -0,097. Artinya, bahwa setiap kenaikan satu variabel partisipasi masyarakat maka Pengelolaan Dana Desa akan turun sebanyak -0,097.
- $\beta_2$  Variabel transparansi sebanyak 0,611. Artinya, setiap peningkatan satu variabel transparansi mengakibatkan pengelolaan dana desa akan naik sebanyak 0,611.
- $\beta_3$  Variabel akuntabilitas sebanyak 0,344. Maksudnya, setiap peningkatan satu variabel akuntabilitas, maka Pengelolaan Dana Desa akan naik sebanyak 0,344.

D. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7: Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R <sup>2</sup>	Adj R <sup>2</sup>	Std. Error Estimasi
1	,770 <sup>a</sup>	,593	,551	1,63864

A. Prediktor: (Konstanta), Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Tranparansi

B. Dependen Variabel: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil SPSS.25

Tabel 7 memperlihatkan Adjusted R<sup>2</sup> sebanyak 0,551 atau 55,1%. Artinya pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Sisanya sebanyak 44,9% merupakan faktor lain di luar studi ini.

2. Uji F

Tabel 8: Uji F ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regrei	113,646	3	37,882	14,108	,000 <sup>b</sup>
	Residu	77,869	29	2,685		
	Total	191,515	32			

a. Dependen Variabel: Pengelolaan Dana Desa

b. Prediktor: (Konstanta), Akuntabilitas, Peran serta Masyarakat, Tranparansi

Sumber: data output SPSS.25

Pada tabel 8 memperlihatkan F hitung sebanyak 14,108 dengan signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Kesimpulannya, variabel partisipasi masyarakat, transparansi serta akuntabilitas secara bersamaan berpengaruh dalam pengelolaan dana desa.

### 3. Uji Signifikansi Ukuran Pervariabel

**Tabel 9: Uji t**

Model		Unstandardized Koefisien		Standardized Koefisien	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Konstanta)	7,735	2,467		3,135	,004
	Partisipasi Masyarakat	-,097	,134	-,117	-,721	,477
	Tranparansi	,611	,197	,570	3,098	,004
	Akuntabilitas	,344	,153	,354	2,253	,032

a. Dependent Variabel: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah oleh SPSS 25

#### a. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa

Nilai uji t statistik sebesar -0,721 lebih kecil dari angka t tabel sebanyak 1,669. Sedangkan nilai uji t sebanyak 0,477  $> 0,05$ . Artinya, variabel peran serta masyarakat (X1) tanpa berpengaruh pada pengelolaan dana desa (Y) di Ds Kare, Kecamatan, Kare Kab Madiun. Hal ini tidak mendukung pada hipotesis pertama sehingga  $H_1$  Ditolak.

#### b. Transparansi pada pengelolaan dana desa

Nilai t statistik sebesar 3,098  $>$  nilai t tabel sebanyak 1,669. Sedangkan nilai signifikansi t sebanyak 0,004  $< 0,05$ . Artinya, transparansi (X2) berpengaruh pada pengelolaan dana desa (Y) di desa Kare, kec Kare, kab Madiun sehingga  $H_2$  diterima.

#### c. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil analisa nilai t statistik sebesar 2,253  $>$  nilai t tabel sebanyak 1,669. Sedangkan nilai signifikansi t sebanyak 0,032  $< 0,05$ . Artinya, akuntabilitas (X3) berpengaruh pada pengelolaan dana desa (Y) di desa Kare Kec Kare, kab Madiun sehingga  $H_3$  diterima.

#### d. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas serta transparansi secara simultan terhadap pengelolaan dana desa

F hitung menunjukkan nilai 11,446, nilai sig  $0,00 < 0,05$ . Maknanya bahwa variabel partisipasi masyarakat, transparansi serta akuntabilitas berdampak bersamaan pada pengelolaan Dana Desa di desa Kare.

## E. Pembahasan

### 1. Peran serta Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa

Kesimpulan riset menunjukkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif pada manajemen Dana Desa di desa Kare, kec Kare, kab Madiun. Masyarakat desa Kare banyak yang tidak memenuhi kewajiban dalam berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, sehingga menimbulkan adanya ketidakmaksimalan dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti akan arti partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang disebabkan sumber daya manusia yang belum memadai. Adapun partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk saling mengingatkan bahwa setiap masyarakat mempunyai andil yang besar dalam pembangunan desa seperti keterlibatannya masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan, serta memberikan ide-ide agar tersalurkan dan dapat dipenuhi dengan baik.

Peran serta masyarakat dalam hal penyaluran aspirasi dan pengawasan mandiri adalah pendukung utama kesuksesan implementasi otoda. Dengan adanya peran serta masyarakat dapat mengawasi berjalannya program desa yang ada serta apabila terjadi kesalahan dalam proses pembangunan desa masyarakat dapat memberikan usulan kembali untuk perbaikan.

Selanjutnya, riset ini sesuai dengan hasil studi Nurhasanah (2019) dengan hasil peran serta masyarakat berpengaruh negatif pada pengelolaan dana desa. Peran serta masyarakat lewat BPD merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi otoda, namun faktanya BPD tidak selalu berperan serta aktif dalam proses pelaksanaan penyusunan budget dana desa. Hal ini disebabkan karena faktor kepedulian, tugas lain BPD serta lokasi yang berjauhan dengan balai pertemuan.

Namun berseberangan dengan hasil riset Premananda serta Latrini (2017), partisipasi bujet berimplikasi positif pada kinerja anggaran. Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan peran serta rakyat berpengaruh mana manajemen dana desa. Sugista (2017) menyimpulkan, peran serta rakyat berpengaruh dalam manajemen keuangan desa.

## 2. Penerapan Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil riset menyimpulkan transparansi berpengaruh positif pada manajemen Dana Desa di desa Kare. Transparansi sudah berjalan dengan baik dengan adanya informasi yang terbuka, jelas dan tepat waktu, relevan, material serta dapat diakses dan dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, mengenai pengelolaan keuangan desa. Maknanya, kegiatan keterbukaan berjalan dengan baik pada proses manajemen dana desa di desa Kare. Keterbukaan yang diimplementasikan oleh pihak desa menyebabkan masyarakat memberikan dukungan penuh atas program-program yang direncanakan ke depan serta masyarakat akan ikut serta dalam kegiatan pengelolaan dana desa sebagai pelaku dilapangan agar terwujudnya kelancaran dalam pembangunan desa.

Pemerintah desa Kare selalu transparan serta tidak menutup akses penyediaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa sebab masyarakat berhak mengetahui informasi keuangan desa. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi pengelolaan dana desa tanpa adanya isu-isu yang dianggap tidak menjalankan tugas dan kebijakan desa. Ringkasan APBDesa dan Dana Desa selalu dipampang di papan pengumuman desa dan banner besar di lokasi strategis.

Premananda dan Latrini (2017) menunjukkan, keterbukaan berimplikasi positif pada kinerja bujet. Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan, transparansi berpengaruh positif pada efektivitas manajemen dana desa di kec Abiansemal, kab Badung.

## 3. Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menghasilkan akuntabilitas berdampak positif dalam manajemen Dana Desa di desa Kare, kec Kare, kab Madiun. Semakin tinggi kegiatan transparansi maka akan menunjukkan proses pengelolaan dana desa yang baik. Akuntabilitas dapat diartikan suatu wujud dari berhasil atau kegagalan dalam memenej dana desa. Pengelolaan dana desa pada desa Kare dikategorikan berhasil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana desa, pemborong yang memenuhi standar peraturan, dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan dana desa.

Premananda dan Latrini (2017) menunjukkan akuntabilitas berdampak positif pada kinerja bujet. Putra dan Rasmini (2019) menunjukkan pertanggungjawaban berdamoak positif pada efektivitas manajemen dana desa di kec Abiansemal, kab Badung. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Saeful Fahri (2019), pertanggungjawaban tidak berpengaruh dalam manajemen dana desa.

## 4. Uji Simultan dalam Pengelolaan Dana Desa

Variabel peran serta rakyat, transparansi serta pertanggungjawaban berpengaruh secara bersamaan pada pengelolaan dana desa pada desa kare. Pengaruh partisipasi masyarakat seperti dukungan dalam membangun dengan melalui pemikiran-pemikiran dan ide-ide masyarakat dan hal tersebut dapat terwujud maka hal tersebut dalam menjadi salah satu bentuk dari peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi yang dimaksud bahwa adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana untuk pembangunan desa, hal ini perangkat desa dapat membuat pengumuman anggaran desa dalam bentuk banner atau informasi publik dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan masyarakat. Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah bahwa perwujudan dari pembangunan benar adanya sesuai dengan perencanaan awal dan tidak adanya rekayasa, sehingga masyarakat dapat mempercayai perangkat dalam pengelolaan dana desa.

## IV. KESIMPULAN

Kesimpulan riset yaitu :

1. Variabel peran serta masyarakat (X1) tidak berpengaruh pada manajemen dana desa.
2. Variabel transparansi (X2) berpengaruh positif terhadap manajemen dana desa.
3. Akuntabilitas (X3) berpengaruh positif dalam manajemen dana desa.
4. Variabel partisipasi masyarakat, transparansi serta akuntabilitas berpengaruh bersamaan pada pengelolaan dana desa.

Peneliti menyarankan agar partisipasi masyarakat terus ditingkatkan pada pengimplementasian Dana Desa. Pemdes mempunyai kewajiban mensosialisasikan makna partisipasi kepada masyarakat. Peran BPD perlu ditingkatkan. Tingginya tingkat partisipasi akan lebih menjamin keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

- Fitria, Norma dan Wibisono, Nurharibnu. 2019. Regulasi, Komitmen Organisasi, SDM, serta Pengelolaan Keuangan Desa pada Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF*, Volume 3, Number 2, 2019, 85-98. Tgl terbit: ISSN 2615-8051 (Online).
- Putra, I Made Yoga Darma, dan Rasmini, Ni Ketut. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, serta Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaann dana Desa. ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Vol*, 28.
- Premananda, Ni Luh Putu Utari dan Latrini, Ni Made Yenni. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, serta Partisispasi Anggaran pada Kinerja Anggaran di Pemkot Denpasar. ISSN: 2302-8556, *E-Jurnal Akuntansi Univ. Udayana*, Vol. 18.3, Maret (2017): 2451-2476
- Sugista. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, serta Partisispasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kab Lampung Selatan). *Skripsi*: FEB Unila.
- Indartini, Mintarti; Widjisenno, Assistriadi & Wibisono, Nurharibnu. 2019. *Jurnal IISTE*. Strengthening Strategy of Indonesian Local Legislative Councils on Budget Oversight. *European Journal of Business and Management.(EJBM)* ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online). Vol.11, No.24, 2019. DOI: 10.7176/EJBM/11-24-07. Publication Date: August 31st 2019, Page 68-74. Penerbit: IISTE.org.
- Nurkhasanah. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Peranserta Masyarakat serta Pemanfaatan TI pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kec. Pancur Kab. Rembang). *Skripsi*: UIN Walisongo Semarang.
- Fahri, Syaeful. 2019/2020. Akuntabilitas, Efektivitas serta Keterbukaan Pemdes pada Pengelolaan Dana Desa (Studi pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen). *STIE: Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*. Yogyakarta.
- Wibisono, Nurharibnu serta Purnomo, Herry. 2017. Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik pada Dana Desa di Kab Madiun. *Jurnal AKSI Vol 2 Edisi 1 September 2017*. P 8-19. p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198.
- Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 45/2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Perpres RI No. 29/2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang No. 6/2014 Tentang Desa